



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi
Dengan	: Panja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang KORPOLKAM (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H.,M.H)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 07 Januari 2025
Waktu	: pukul 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Penyusunan Laporan Panja BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M
Ketua Rapat	: H. Abdul wachid.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 09.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH tahun 1446 H / 2025 M Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., dan Wakil Ketua H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Koordinasi Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengenai **Persiapan Pelaksanaan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyedia layanan di Arab Saudi (vendor) harus terbuka dan terdiri dari banyak pihak agar tercipta iklim persaingan yang sehat, bebas monopoli, serta pelayanan yang lebih optimal bagi para jemaah.
2. Mendorong agar layanan transportasi, termasuk pemilihan maskapai juga bebas dari praktik monopoli. Hal ini dilakukan juga untuk menciptakan persaingan yang sehat serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
3. Keseimbangan komposisi antara jemaah haji reguler murni dengan petugas haji harus proporsional agar pelayanan yang diberikan juga dapat lebih optimal. Maka pemerintah harus melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk kemungkinan adanya penambahan kuota bagi petugas haji.
4. Petugas haji yang berasal dari satuan TNI/Polri perlu untuk ditingkatkan. Pengalaman dan kemampuan TNI/Polri untuk melakukan tugas-tugas di lapangan dapat menjadi modal penting dalam peningkatan layanan kepada jemaah.
5. Presiden telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI agar dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M dengan transparan dan akuntabel.
6. Antisipasi adanya jemaah dengan Visa Ziarah harus dilakukan dengan berbagai pihak. Pentingnya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan agar persoalan Visa Ziarah dapat diantisipasi secara lintas sektoral.
7. Gagasan tentang Kampung Haji dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait, karena gagasan tersebut telah ditangkap sangat positif oleh masyarakat luas.

8. Pengadaan obat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi Arab Saudi. Kebutuhan vitamin, antibiotik, anti-virus, dan lain sebagainya harus disesuaikan karena suhu, bakteri, maupun virus di Arab Saudi tentu berbeda dengan kondisi di Indonesia.
9. Kelayakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) perlu ditingkatkan, baik sarana dan prasarana maupun pelayanannya.
10. Persoalan keterbatasan area di Mina perlu segera diselesaikan agar bertambahnya kuota jemaah haji Indonesia di masa yang akan datang tidak menjadi persoalan serius dalam hal akomodasi dan kelayakan daya tampung bagi jemaah.
11. Rencana tentang pengurangan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi menjadi maksimal 31 hari dapat mengurangi beban biaya per jemaah. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai infrastruktur pendukung seperti Bandara dan jumlah maskapai yang lebih memadai agar hal tersebut dapat terlaksana.
12. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa beliau telah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi, yang akan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di titik-titik krusial saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup Selasa, 07 Januari 2025 pukul 11.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA BPIH Tahun 1446 H/2025 M,**

TTDS

H. ABDUL WACHID